

**Seminar Nasional dan Call For Paper
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

**PENGARUH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN, BELANJA KESEJAHTERAAN
SOSIAL, BELANJA MODAL, DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI BIDANG
PENDIDIKAN TAHUN 2018**

Aurelia Kamila Duanti

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: aureliakamiladuant@gmail.com*

Atwal Arifin

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: atwal_arifin@ums.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze the effect of education function expenditure, social welfare expenditure, capital expenditure, and special allocation funds on the achievement of SDGs in education. Samples were collected using a purposive sampling method from 508 samples of districts/cities. This study uses data from realization reports of Local Government Budget and indicator from Human Development Index in districts/cities in Indonesia 2018. Testing using SPSS for Windows Version 22.0. The result shows that spending on the education function has a significant effect while special allocation funds has a negative effect on the achievement of Sustainable Development Goals in education. Further variables social welfare expenditure and variables capital expenditure have not significantly influence the achievement of Sustainable Development Goals in education.

Keywords: *Education Function Expenditure, Social Welfare Expenditure, Capital Expenditure, Special Allocation Funds, Sustainable Development Goals.*

Pendahuluan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan global yang dibahas dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Dihadiri sekurangnya 193 kepala negara termasuk Wakil Presiden Yusuf Kalla yang turut mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia. Secara resmi pada 1 Januari tahun 2016, *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs).

Istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) diusulkan pertama kali oleh Pemerintah Kanada, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012 untuk menjadi agenda pembangunan global. SDGs diharapkan dapat menyelesaikan agenda pembangunan dengan tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, termasuk saat perubahan iklim. SDGs juga diharapkan dalam agenda transformasi yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

Di Indonesia SDGs lebih dikenal dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemenuhan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan SDGs atau TPB dengan penyelerasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo telah

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 pada 4 Juli 2017. Perpres ini berisi tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disampaikan Presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di *Hamburg Messe Und Congress*, Jerman pada 7 Juli 2017.

SDGs memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 232 indikator yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. SDGs membawa 5 prinsip mendasar yaitu, *People* (manusia), *Planet* (bumi), *Prosperity* (kemakmuran), *Peace* (perdamaian), dan *Partnership* (kerjasama) atau sering disebut dengan prinsip 5P. Prinsip-prinsip ini menaungi seluruh tujuan dan indikator SDGs yang tidak dapat terpisahkan, saling terhubung serta terintegrasi satu sama lain guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Di Indonesia sistem pendidikan masih mengalami krisis pembelajaran, khususnya terkait kemampuan literasi dan numerasi murid. Diukur menggunakan data yang diperoleh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting guna mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM juga merupakan data strategis yang digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah. Terdapat tiga dimensi dasar didalam IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi pengetahuan diukur melalui dua indikator, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator inilah yang akan digunakan sebagai ukuran pencapaian SDGs dibidang pendidikan.

Sejak saat diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah. Namun keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Dikarenakan pemerintah daerah memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah, dan yang lebih penting adalah lebih dekat kepada warganya. Ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban pada setiap pemerintah daerah. Pada dasarnya keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan diwilayahnya diukur melalui pengoptimalan anggaran dalam alokasi fungsi perlindungan sosial. Menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat.

Peningkatan pembangunan manusia, pemerintah mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan melalui belanja pemerintah pusat. Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen setiap tahunnya untuk fungsi pendidikan. Pengalokasian anggaran fungsi pendidikan dinilai masih kurang efektif, dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tanpa adanya perbaikan kualitas ajar mengajar yang masih sangat kurang. Hal ini yang menyebabkan banyak peserta didik yang berperilaku menyimpang, misalnya tawuran ataupun membolos. Namun demi menyongsong revolusi industri, pemerintah mulai menggeser fokusnya dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amin (2018) yang menyatakan bahwa peran pemerintah tidak dapat diabaikan dalam pencapaian SDGs. Hal ini memberikan acuan pada penelitian ini untuk meneliti pengaruh belanja pemerintah terhadap SDGs yang terfokus pada tujuan pendidikan.

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Menurut Jensen and Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dan agen dengan berdasarkan pada pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Negara demokrasi seperti Indonesia memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat. Disisi lain, pemerintah daerah harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Halim (2007), adanya hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal. Dalam pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah dalam penyusunan APBD, diharuskan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terkait arah dan kebijakan umum dan prioritas anggaran. Hal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Hubungan dan masalah antara eksekutif dan legislatif merupakan sesuatu yang saling terkait dan tak terpisahkan dalam penganggaran keuangan publik.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Menurut Odekunle (2012), *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah suatu target spesifik yang diadopsi secara internasional bertujuan untuk pengurangan kemiskinan secara global, namun secara khusus adalah mengembangkan negara pada tahun 2015.

Berakhirnya MDGs pada tahun 2015, menyisahkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode selanjutnya yaitu pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dilaksanakan tahun 2015 sampai tahun 2030. Menurut BPS (2014), ada 17 tujuan SDGs yaitu antara lain:

- a) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.
- b) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan.
- c) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia.
- d) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
- e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
- f) Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan.
- g) Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan berkelanjutan, dan modern.
- h) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- j) Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.
- k) Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- l) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- m) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- n) Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

- o) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- p) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif akuntabel dan inklusif disemua tingkat.
- q) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

SDGs dibidang pendidikan merupakan tujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang atau masyarakat memiliki akses atau memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya (BPS, 2016).

Belanja Fungsi pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Belanja Pemerintah, belanja fungsi pendidikan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Belanja fungsi pendidikan merupakan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat pada APBN, serta transfer ke daerah yaitu berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengeluaran pembiayaan pada APBD.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (UUD 1945 Pasal 31 ayat (4)). Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer dana ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, kecuali anggaran pendidikan kedinasan untuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

H₁ : Belanja Fungsi Pendidikan Berpengaruh Terhadap Tercapaian SDGs Dibidang Pendidikan.

Belanja Kesejahteraan Sosial

Belanja kesejahteraan sosial merupakan belanja pemerintah daerah yang berdasarkan pada fungsi, yaitu belanja fungsi perlindungan atau jaminan sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Belanja Pemerintah, Belanja fungsi perlindungan atau jaminan sosial merupakan suatu pengeluaran yang digunakan untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial dan lingkungan.

Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tentang penurunan angka kemiskinan di Indonesia yaitu 9,82 persen dibanding dengan tahun 2017 yaitu sebesar 10,12 persen. Prosentase tersebut merupakan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sudah mencapai target dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

H₂ : Belanja Kesejahteraan Sosial Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran secara rutin yang dilakukan oleh pemerintah guna menambah atau memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang akan memberikan suatu manfaat pada periode selanjutnya. Belanja modal termasuk dalam klasifikasi

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

anggaran belanja APBD yang telah diatur pada Peraturan Menteri No. 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran.

Infrastruktur pendidikan yang memadai akan meningkatkan angka harapan lama sekolah di masyarakat. Serta, dapat membangun kesetaraan pendidikan diseluruh masyarakat Indonesia tanpa terhambat dengan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ajar mengajar.

H₃ : Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi untuk keperluan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Menurut Nordiawan *et al* (2012), penggunaan alokasi DAK disetiap daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan harus dilakukan sesuai petunjuk teknis penggunaan DAK dan tidak digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian dan perjalanan dinas.

H₄ : Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Terhadap SDGs Dibidang Pendidikan.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu, kelengkapan pada data yang dipublikasikan. Sumber data yang diperoleh yaitu data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data statistik berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diproses dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2018.

Tabel 1.
Hasil Pengumpulan Data

No.	Keterangan	Jumlah
1	Sampel diperoleh	508
2	Data Realisasi APBD yang tidak lengkap	5
Total Sampel		503

Sumber : Data Diolah, 2019

Hasil dan Pembahasan

Dalam menguji data dengan analisis regresi berganda, sebelumnya data harus dipastikan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Berikut adalah gambaran singkat hasil uji asumsi klasik :

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Keterangan	Hasil Uji Heteroskedastisitas	Uji Multikolinearitas
------------	-------------------------------	-----------------------

**Seminar Nasional dan Call For Paper
Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0**

		<i>Tolerance</i>	VIF
Belanja Fungsi Pendidikan	0,263	0,289	3,463
Belanja Kesejahteraan Sosial	0,664	0,515	1,940
Belanja Modal	0,159	0,369	2,706
Dana Alokasi Khusus	0,604	0,419	2,389

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

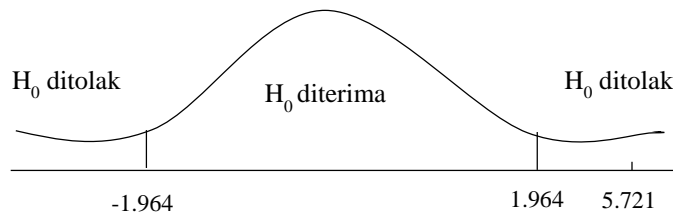
Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan model Central Limit Theorem (CLT) yang menyatakan bahwa apabila sampel yang diuji lebih dari atau samadengan 30 ($n \geq 30$), maka dapat disimpulkan bahwa distribusi sampel pada penelitian ini terdistribusi normal. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance value* lebih besar 0,10 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan nilai Sig. 0,05, semua variable independen memiliki nilai Sig. $> 0,05$, maka dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.	Keterangan
Belanja Fungsi Pendidikan	5,721	$\pm 1,964$	0,000	H ₁ Diterima
Belanja Kesejahteraan Sosial	-0,375	$\pm 1,964$	0,708	H ₂ Ditolak
Belanja Modal	-1,386	$\pm 1,964$	0,166	H ₃ Ditolak
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-4,701	$\pm 1,964$	0,000	H ₄ Diterima

Sumber : Data Sekunder diolah (2019)

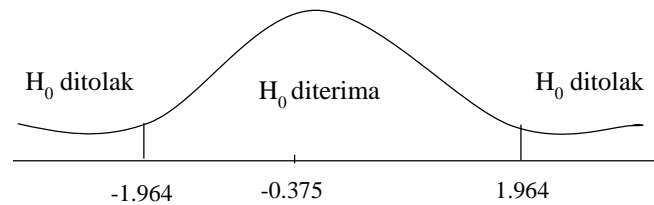
- 1) H₁ : Belanja Fungsi Pendidikan Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan



Variabel belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa t-hitung $>$ t-tabel atau $5.721 > 1.964$. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel belanja fungsi pendidikan berpengaruh signifikan, karena Sig. $<$ 0.05. Disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima. Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat diabaikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengalokasian belanja fungsi pendidikan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti pembelian buku, fasilitas jaringan internet sekolah maupun gedung sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap pencapaian SDGs dibidang pendidikan. kemungkinan semakin tinggi anggaran belanja fungsi pendidikan maka semakin tinggi pencapaian SDGs dibidang pendidikan.

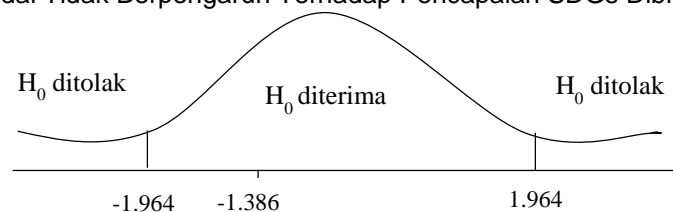
- 2) H₂ : Belanja Kesejahteraan Sosial Tidak Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0



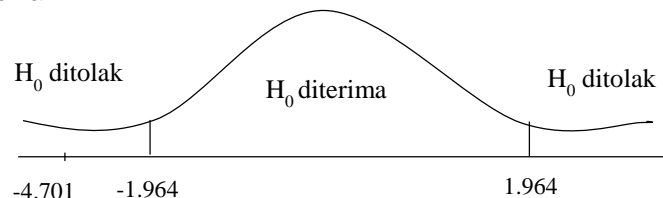
Variabel belanja kesejahteraan sosial tidak berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $-0.375 < 1.964$. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel belanja kesejahteraan sosial tidak berpengaruh signifikan, karena $\text{Sig.} > 0.05$. Disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak. Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat diabaikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengalokasian belanja kesejahteraan sosial merupakan pengeluaran yang berfokus untuk jaminan perlindungan masyarakat seperti penanganan bencana, permasalahan sosial dan lingkungan. Dikarena hal tersebut memungkinkan tidak adanya pengaruh secara langsung terhadap kualitas pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja kesejahteraan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs dibidang pendidikan.

- 3) H_3 : Belanja Modal Tidak Berpengaruh Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan



Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $-1.386 < 1.964$. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan, karena $\text{Sig.} > 0.05$. Disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat diabaikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengalokasian belanja modal merupakan pengeluaran secara rutin guna menambah atau memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat pada periode selanjutnya. Meskipun infrastruktur penunjang pendidikan sudah maksimal dianggarkan oleh pemerintah, kemungkinan hal tersebut belum dapat menunjang kualitas pendidikan menjadi efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs dibidang pendidikan.

- 4) H_4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Negatif Terhadap Pencapaian SDGs Dibidang Pendidikan



Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan. Dijelaskan pada kurva diatas bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $-4.701 < -1.964$ namun nilai $t\text{-hitung}$ H_4 berada pada area H_0 ditolak, sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Jika dilihat dari nilai signifikan, variabel DAK berpengaruh signifikan, karena $\text{Sig.} < 0.05$. Disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima.

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

Menurut hasil penelitian Amin (2018) peran pemerintah pusat tidak dapat diabaikan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengalokasian DAK merupakan pengeluaran pemerintah guna membantu dalam pengalokasian kebutuhan khusus oleh kepala daerah. Sehingga disimpulkan bahwa adanya pengaruh dalam pencapaian SDGs dibidang pendidikan, namun pengaruh tersebut bernilai negatif. Apabila pemerintah meningkatkan alokasi DAK, maka pencapaian SDGs dibidang pendidikan akan menurun. Sedangkan, apabila pemerintah menurunkan alokasi DAK, maka pencapaian SDGs dibidang pendidikan akan meningkat. Kemungkinan ketika sarana penunjang pendidikan semakin meningkat, hal tersebut dapat membuat peserta didik bersifat malas dan kualitas pendidikan akan menurun atau tidak efektif.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) H_1 : Belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan.
- 2) H_2 : Belanja kesejahteraan sosial tidak berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan.
- 3) H_3 : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan.
- 4) H_4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

- 1) Sampel pada penelitian hanya menggunakan rentang satu tahun yaitu tahun 2018 sehingga tidak dapat dijenalisir.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, yaitu belanja fungsi pendidikan, belanja kesejahteraan sosial, belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibidang pendidikan.

Oleh karenanya saran yang dapat disampaikan untuk perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan sebaiknya lebih dari satu tahun agar dapat dijenalisir dengan lebih rinci.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen agar dapat dijenalisir dengan lebih rinci.

Daftar Pustaka

Amalia, Wia Rizqi *et al.* 2015. "Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 15. No. 1.

Amandemen Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Amin, Khaled Zakaria. 2018. "Fiscal Decentralization as an Approach to Finance and Archieve SDGs in Africa". *A Research Paper Presented to the UNECA's High Level Policy Dialogue on Development Planning in Africa*.

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

- Amiyati, Nuri dan Andy Dwi Bayu Bawono. 2018. "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017)". Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper. ISSN: 2460-0784.
- Annur, Syubhan *et al.* 2018. "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Peningkatan Kualitas Pendidikan". *Jurnal Seminar Nasional Pendidikan*. ISBN: 978-602-6483-63-8.
- Astuty, Pudji. 2018. "Kemandirian Keuangan Daerah: Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia". *Jamak*. Volume 5. Nomor 2. ISSN: 2355-8466.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. <https://bps.go.id> diakses pada 28 September 2019 Pukul 13.00 WIB.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. <https://bps.go.id> diakses pada 9 Oktober 2019 Pukul 12.30 WIB.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. <https://bps.go.id> diakses pada 9 Oktober 2019 Pukul 12.30 WIB.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. <https://bps.go.id> diakses pada 1 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB.
- [Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan](https://bps.go.id). 2018. *Ringkasan APBD 2018*.
- Fahlevi, Heru. 2018. "Revenue Budget Variance and Capital Expenditure Realization Empirical Evidence from Indonesia Local Government". *Jurnal Dinamika Akuntansi* 9(1): 1-10.
- Francisco *et al.* 2016. "Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi". *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Volume 8 Nomor 2.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Anwar. 2017. *Penjelasan Tentang Uji Normalitas dan Metode Perhitungan*. <https://www.statistikian.com/>. Diakses pada 13 November 2019 Pukul 20.15 WIB.
- <https://www.maxmantoe.com>. Diakses pada tanggal 29 September 2019 pukul 20:14 WIB.
- Jensen, M and Mecking, W. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Kemendikbud. 2019. *Tiga Fokus Pembangunan Manusia di Sektor Pendidikan*. <https://www.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 12 Oktober 2019 Pukul 12.30 WIB.
- Kemenkeu. 2017. *Informasi APBN 2018*". <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 1 November 2019 Pukul 19.30 WIB.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, D., I. S. Putra dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Odekunle, Olukolade dan Oluwakemi Okuwa. 2012. *Enhancing Quality Basic Education for The Attainment of Millenium Development Goals in Nigeria: Suggested Policy Interventions*. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS)*. 3(1):92-98. ISSN: 2141-6990.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Seminar Nasional dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0

Peraturan Menteri No. 102/PMK.02/2018.

Pribadi, Roy Eka. 2017. *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 5(3):917-932. ISSN: 2477-2623 (online). ISSN: 2477-2615 (print).

Rezeki, Nofa Sapitri. 2017. "Desentralisasi Fiskal: Studi tentang Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014". *JOM FISIP. Volume 4. No 1.*

Sachs, Jeffrey D. 2015. "Goal-based Development and The SDGs: Implications for Development Finance". *Oxford Review of Economic Policy. Volume 31, Numbers 3-4, PP. 268-278.*

Santono, Hamong, *et al.* 2015. "Sustainable Development Goals-SDGs: Panduan untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah". Infid (*International NGO Forum on Indonesian Development*).

Sinakou, Eleni, *et al.* 2018. "Academic in The Field of Education for Sustainable Development: Their Conceptions of Sustainable Development". *Journal of Cleaner Production. Doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.279. 321-332.*

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Pengertian Anggaran Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tresna, Yosi Diani. 2017. "Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret". *Buletin Smeru. Nomor 2. ISSN: 0216-8634.*

UU No. 17 Tahun 2003.

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1), Pasal 12 (1) dan Pasal 45 (1).

UU No. 25 Tahun 2005.

UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 (7).

UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 (8).

UUD 1945 Pasal 31 (4).

Widiyastuti, Astriana. 2012. "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009". *Economics Development Analysis Journal. ISSN: 2252-6560.*